RESEARCH/REVIEW ARTICLE

Dampak Negatif Belum Terlaksananya Pelimpahan Aset Oleh Daerah Induk Kepada Daerah Otonomi Baru (Studi Pemekaran Kota Kupang Dari Kabupaten Kupang)

The Negative Impact of the Assignment of Assets Not Yet Executed by the Regional Government in the New Autonomous Region (Study of the Expansion of the City of Kupang from the Regency of Kupang)

Sirilus N. M. Lelan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi NTT

Corresponding Author: Sirilus N. M. Lelan
Email: sirilus.lelan@yahoo.com lelansirilus@gmail.com

Naskah Diterima : 12 Desember 2019; Di-review : 20 Desember 2019; Dimuat: 30 Desember 2019

DOI :
Copyright ©FLOBAMORA 2019

Abstract

This research was conducted to find out the impact caused by not yet being fully transferred assets, especially immovable assets, land and buildings to the new autonomous region namely the City of Kupang. This research is a qualitative descriptive study, which focuses on the study of documents, interviews and observations. The findings from the documents, interviews and observations made, inform that based on the legislation, assets in the area of expansion should be submitted. In fact these immovable assets are still owned and have not been fully transferred to the new autonomous region. The impact of this is that Kupang City development planning is constrained by a number of assets that are still owned by the parent area, chaotic city planning, population administration for residents in border areas that are still gray.

Keywords: Regional Autonomy; Delegation and Asset;

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu dampak yang ditimbulkan oleh karena belum diserahkan sepenuhnya aset-aset khususnya aset tidak bergerak, tanah dan gedung kepada daerah otonom baru yakni Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang menitikberatkan kepada studi dokumen, wawancara dan observasi. Temuan dari dokumen, wawancara dan observasi yang dilakukan, menginformasikan bahwasanya berdasarkan aturan perundang-undangan sudah seharusnya aset yang berada di wilayah pemekaran diserahkan. Nyatanya aset-aset tidak bergerak tersebut masih dimiliki dan belum sepenuhnya diserahkan ke daerah otonom baru. Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut yakni perencanaan pembangunan Kota Kupang terkendala dengan beberapa aset yang masih dimiliki daerah induk, tata kota yang sembrawat, administrasi kependudukan bagi warga yang berada di daerah batas yang masih abu-abu.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pelimpahan dan Aset

1. Pendahuluan

Reformasi yang dimulai dengan pergerakan massal para mahasiswa tahun 1998, sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap kepemimpinan pada saat itu yang dinilai diktator dan sarat akan penindasan serta pelanggaran-pelanggaran juga monopoli kekuasaan dan lainnya. Reformasi ini bukan saja melengserkan kepemimpinan saat itu, akan tetapi juga merubah tatanan pemerintahan (<https://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-5.pdf>).

Reformasi tersebut pun membuka peluang besar bagi daerah-daerah, dengan system sebelumnya yang sangat sentralistik digeser atau mulai ditinggalkan menuju ke arah yang lebih desentralis (Akbal, 2016). Pada saat itu pun dalam hal legislasi, DPR pun tidak tinggal diam guna mempercepat proses desentralisasi tersebut, yakni dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah seterusnya mengalami perubahan-perubahan dan perbaikan sampai pada undang-undang yang terakhir mengatur tentang pemerintah daerah yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (BPHN, 2015).

The Liang Gie (Dwisuda, 2014) menyebutkan ada beberapa alasan ideal dan filosofis diselenggarakan desentralisasi pada pemerintahan daerah otonomi daerah. Mencegah penumpukan kekuasaan yang pada akhirnya menyebabkan tirani, sebagai tindakan pendemokrasian, melatih rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih dalam menggunakan hak-hak dalam berdemokrasi, mencapai pemerintahan yang efisien, kebijakan yang sesuai dengan daerah setempat, untuk ada perhatian berlebih dan khusus dalam menjaga serta mempertahankan kultur, ciri khas suatu daerah, baik itu segi geografis, ekonomi, kebudayaan dan latar belakang sejarah agar kepala daerah dapat secara langsung melakukan pembangunan di daerah tersebut. Sejauh sejarah Indonesia, sudah sebanyak 11 regulasi yang mengatur tentang pemerintah daerah, dimulai dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah (KND), komite ini dibentuk dalam rangka persiapan pemilihan umum. Dan selanjutnya yang paling terbaru sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu yakni Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014(Safitri, 2016).

Selain beberapa undang-undang tersebut, ada pula 2 undang-undang dalam kaitannya dengan desentralisasi dengan pendekatan dialogis, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Propinsi Papua (Suharyo)(Suharyo, 2011). Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang luas tersebut dikecualikan untuk 5 peran penting yang tidak bisa diserahkan kewenangannya kepada daerah otonomi yakni pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan fiskal-moneter dan makroekonomi, peradilan dan agama (Negara, 2004).

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah pun, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semenjak digulirkannya reformasi tersebut, ada beberapa daerah yang memekarkan diri dari kabupaten induknya. Pada tahun 2000 Provinsi NTT baru memiliki 14 Kabupaten/Kota, selanjutnya semenjak saat itu sampai sekarang sudah berkembang menjadi 22 kabupaten/kota yang berada di provinsi NTT.

Didaratkan Timor sendiri terhitung dari tahun 1996 sampai saat ini, sudah ada 2 daerah yang memekarkan diri, yakni Kota Kupang dari Kabupaten Kupang dan Kabupaten Malaka dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Belu tepatnya pada tahun 2013. Kota Kupang pada awalnya, setelah pemekaran, dipimpin oleh Walikota Mesakh Amalo dengan Wakilnya Samuel K. Lerik, dan seterusnya sampai saat ini dipimpin oleh Walikota yang keempat yakni Dr. Jefirston R. Riwu Kore, MM., MH dengan wakilnya dr. Hermanus Man.

Semenjak memekarkan diri dari kabupaten induk, Kotamadya Kupang mulai berbenah dalam hal pembangunan. Pembenahan-pembenahan yang terjadi tersebut terjadi pada setiap sendi, baik itu dalam tubuh birokrasi dan pembenahan fisik. Pemekaran Kotamadya Kupang dari daerah

induk yang adalah Kabupaten Kupang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Sebagaimana halnya suatu daerah baru, yang telah memekarkan diri, sudah barang tentu akan ada ketimpangan-ketimpangan sampai pada masalah-masalah yang akan bermunculan. Beberapa masalah tersebut diantaranya menyangkut cakupan wilayah, batas-batas wilayah, DPRD, pengalihan pegawai, pendanaan, dokumen, peralatan maupun aset. Bukannya tanpa penyelesaian akan tetapi kesemua hal yang disebutkan tersebut telah pula dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kupang.

Pada Bab V dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 yang mengatur tentang ketentuan peralihan. Ada 5 pasal yang mengatur tentang peralihan, di pasal 11 mengatur tentang pengangkatan pejabat walikotamadya pertama, dipasal 12 mengatur tentang DPRD dan tata cara pengangkatannya. Pasal 13 mengatur tentang penyerahan PNS, aset bergerak dan tidak bergerak, BUMD, utang-piutang, dokumentasi, arsip, perlengkapan kantor serta arsip. Di pasal 14 diatur mengenai pemberian dana modal bagi daerah otonom baru dan jumlahnya yang diserahkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan atas usulan Menteri Dalam Negeri (Indonesia, 1996).

Dalam melakukan pembentukan daerah perlu memperhatikan 3 (tiga) aspek yang menjadi syarat, yaitu administratif, teknis, dan fisik kewilayahan, yang mana dengan melihat 3 (tiga) aspek tersebut jika dipertimbangkan dengan baik maka diharapkan akan terciptanya sebuah pelaksanaan otonomi daerah yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sehingga terciptalah sebuah kesejahteraan masyarakat (Sari, Penyerahan Aset Tetap Daerah Dari Kabupaten Serang Kepada Kota Serang Provinsi Banten, 2016).

Dalam kaitannya dengan Kabupaten Kupang sebagai kabupaten induk dan Kota Kupang sebagai daerah pemekaran, ada beberapa aspek yang sampai saat ini belum jelas realisasinya, yakni mengenai aset tidak bergerak. Masih banyaknya aset tidak bergerak daerah induk yang belum diserahkan kepada daerah otonom baru, sejauh pengamatan dan penelitian yang

dilakukan, ada beberapa gedung dan tanah yang sampai saat ini belum sepenuhnya diserahkan ke daerah otonom baru yakni Kota Kupang, sampai pada berbelit-belitnya prosedur dan tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan aset tidak bergerak tersebut sebagai aset Kota Kupang.

Selama masa transisi, daerah otonom baru mencoba untuk mendata semua aset tidak bergerak dalam wilayahnya untuk dibahas bersama dengan daerah induk. Hal tersebut sampai saat ini masih berjalan dan cenderung masih menjadi polemik serta menimbulkan masalah. Lelan (2018) disebutkan bahwasanya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996, telah disebutkan dengan jelas menyangkut pelimpahan aset tidak bergerak, bahkan sampai pada sanksi yang akan diberikan jika aset-aset tersebut tidak diberikan kepada daerah otonom baru. Bahkan pada ayat (2) pun diatur waktu maksimal untuk penyerahan semua aset tersebut yakni setahun setelah diresmikan daerah otonom baru yakni Kotamadya Kupang. Seperti yang tertuang dalam pasal dan ayat tersebut, pada pasal-pasal sebelumnya pun dengan jelas dikatakan wilayah-wilayah yang masuk dalam daerah pemekaran Kotamadya Kupang disertai dengan batas-batas wilayahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini, aset-aset tidak bergerak seperti tanah dan gedung belum sepenuhnya diserahkan kepada daerah otonomi baru Lelan (2018).

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lain yang sah. Barang milik daerah sering kita kenal sebagai aset daerah, aset dalam Pernyataan Satuan Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP) mendefinisikan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Sari, 2016).

Terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset tetap sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tidak sinkronnya antara visi misi daerah dengan pengadaan aset tetap, *fraud*, rendahnya anggaran infrastruktur, masih belum optimalnya penyefraktur, masih belum optimalnya penyerapan, dan rendahnya kontribusi aset tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Temuan BPK menunjukkan kelemahan yang terjadi pada hampir seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah dalam pengelolaan aset tetap (Kurniati, Asmony, & Santoso, 2017; Prabowo, Leung, & Guthrie, 2017; Randa & Daromes, 2014) (Rochmawati, 2018).

Kenyataan yang terjadi antara Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, sebagaimana yang terlihat saat ini adalah masih banyaknya aset kabupaten induk yang berada di wilayah daerah pemekaran, dengan papan nama yang dipatok di atas lahan tersebut maupun gedung. Aset-aset tidak bergerak yang belum diserahkan tersebut ada yang tidak diperhatikan dan terkesan dibiarkan. Oleh karenanya kesan kumuh dan tidak teratur nampak dari aset-aset yang belum 'jelas' kepastiannya. Maka dari itu, dalam tulisan ini akan dilihat dampak yang ditimbulkan dari belum diserahkannya aset tidak bergerak kabupaten induk kepada daerah otonom baru.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena dan kejadian yang berlangsung. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, dan lain-lain sehingga dapat dijadikan sebagai suatu kebijakan demi kesejahteraan bersama. (Al-Ghazaruty, 2009) (Nilamsari, 2014).

Dalam metodologi penelitian kualitatif, terdapat beragam metode pengumpulan data/sumber yang biasa digunakan. James Mc. Millan dan Sally Schumacer dalam *Research in Education; A Conceptual Introduction*, menyebut

setidaknya ada empat strategi pengumpulan data dengan multi-metode dalam penelitian kualitatif: observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumen dan artefak, serta teknik pelengkap. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik dalam pengumpulan data yakni dokumen, wawancara mendalam dan observasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Manajemen aset didefinisikan sebagai sebuah proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, serta mampu mendorong tercapainya tujuan. Secara umum, siklus pengelolaan aset adalah tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun (2007) siklus tersebut mulai dari: (1) Perencanaan; meliputi penentuan kebutuhan dan penganggarnya, (2) Pengadaan; meliputi cara pelaksanaannya, standar barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya, (3) Penyimpanan dan penyaluran, (4) Pemeliharaan, (5) Penatausahaan, (6) Penggunaan, (7) Pemanfaatan, (8) Pengamanan, (9) Penilaian, (10) Penghapusan, (11) Pemindahtanganan, (12) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, (13) Pembiayaan, (14) Tuntutan ganti rugi (Pangayow M. R., 2016).

Pengelolaan aset merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi khususnya di daerah. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan mampu memberikan potensi kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di sisi lain diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat (Pangayow M. R., 2016).

Masih banyaknya aset tidak bergerak, yakni tanah dan gedung yang berada di wilayah Kota Kupang dan belum diserahkan, akan mempersulit daerah induk dalam hal kontrol dan pemanfaatannya. Hal ini dengan sendirinya akan memperburuk wajah daerah pemekaran jika tidak ditata dan diurus dengan baik. Contoh yang paling nampak, dapat kita lihat di kawasan ex kantor bupati di kelurahan LLBK, kawasan dengan peruntukkan perkantoran pemerintah ini tidak diurus dan dirawat dengan baik oleh daerah induk, dan daerah pemekaran pun tidak bisa serta merta mengambil alih dan menata kawasan atau lokasi tersebut dikarenakan belum diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah pemekaran.

Adapula beberapa lahan kosong berplang ‘milik pemerintah Kabupaten Kupang’ yang tidak dirawat dan dipelihara, lokasi lahan-lahan kosong ini banyak tersebar di wilayah Kecamatan Kelapa Lima.

Ada beberapa informasi yang diperoleh, pada saat penelitian dengan beberapa informan yang ditemui. Dengan Bapak Max (Z1, salah satu pejabat di Pemkot), dikatakan beliau:

“Perencanaan pembangunan sebenarnya kalo diserahkan, kita bisa rencanakan untuk pemanfaatan bagi masyarakat juga tapi terbengkalai, sisi lain itu aspek keindahan kota tidak dimanfaatkan, tidak diurus, pengawasan yang dengan kurang baik oleh pemkab sehingga kita yang dapatkan hal yang tidak baik dari masyarakat”.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 adalah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdayaguna dan berhasil guna serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang ada (Widayanti, Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (studi Kasus di Kabupaten Sragen), 2010).

Dadson et. al (2006) menjelaskan tentang mengoptimalkan manajemen aset tanah di Ghana dalam rangka menuju *good governance*. Langkah-langkah tersebut berada di seputar legislasi, organisasi dalam sektor tanah, *data base* dan peta serta mekanisme sistem lahan yang berkelanjutan.(DaDson, 2006). Siregar (2004) menyatakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini (Widayanti, Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (studi kasus di Kabupaten Sragen), 2010).

Lebih lanjut dalam wawancara tersebut, dikatakan bahwa:

“Masih ada tumpang tindih. Waktu dulu ada aset pemkot yang namanya sertifikat P5 itu luasnya 77,7 hektar tetapi disitu ada kepemilikan aset pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kupang dan pemerintah kota maupun sisa-sisa

karena dulu ada pembagian kapling. Karena dulu ada relokasi penduduk dari ex RSU W. Z Johanes yang dari fontein ke sini itu P5 itu hak dari pemkot, apakah sifat pemerintahan dulu yang sentral itu atau koordinasi yang bagus, bahwa gubernur bisa memerintah bupati untuk menyiapkan lokasi untuk penduduk yang direlokasi. Tapi sekarang tidak lagi, masing-masing pemerintah menjaga dan dipelihara asetnya. Jadi yang sebenarnya masih kurang itu yaa penyerahan aset baik itu dari pemkab dan pemprov”.

Pengurusan aset oleh kedua daerah ini (daerah induk dan daerah pemekaran), yang memakan waktu panjang dan terkesan diulur-ulur ini, kerab kali menjadi temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga atau badan yang berwenang.

Kabupaten Kupang beberapa kali mendapat predikat *disclaimer* dari BPK perwakilan, yang mana salah satu catatan penting dalam laporan tersebut tentang keberadaan, kepemilikan dan sebaran (lokasi) aset khususnya aset tidak bergerak (tanah dan gedung).

Sedangkan dalam wawancara yang dilakukan dengan pakar hukum Undana, dikatakan beliau bahwa “dengan sendirinya pelayanan kepada masyarakat akan terganggu”. Selanjutnya dalam diskusi dengan peneliti, mengenai konsekuensi yang muncul oleh karena daerah induk belum menyerahkan asetnya yang telah tertuang dalam undang-undang tersebut, dikatakan:

“Sebenarnya menurut saya ada konsekuensi mestinya, kan kalo pemerintah daerah yang bersangkutan tidak menyelesaikan itu maka harus diberikan sanksi oleh pemerintah ditingkat atas misalnya Pemprov atau kemendagri”.

Lebih lanjut dalam diskusi tersebut, dikatakan informan ahli sebagai berikut:

“Artinya setidaknya yang pertama, Pemerintah yang di atas itu bisa mengambil alih untuk menyelesaikan kalo tidak bisa memberikan sanksi, bisa sanksi administrasi, bisa juga sanksi anggaran, anggaran dari daerah otonomi itu sebagian besar masih dari pusat, jadi kalo kamu tidak menyelesaikan masalah ini tahun depan kami tidak memberikan anggaran seperti DAK atau DAU atau dipotong sebagian, itu artinya memberikan mereka tekanan untuk menyelesaikan. Kan sekarang sudah 22 tahun ini kenapa tidak selesaikan”.

Dari dua informan ini, dapat dilihat bahwa, daerah induk masih tetap mempertahankan asetnya yang masih berada di wilayah daerah pemekaran. Adapun aset yang sudah diserahkan, hanya sebatas komunikasi atau pada saat duduk diskusi bersama, akan tetapi tindak lanjut untuk penyerahan atau pelimpahan kepada daerah induk ini masih belum dilakukan. Sebagaimana yang

diuraikan sebelumnya bahwa, segala urusan mengenai administrasi penyerahan dan pelimpahan belum dilakukan sehingga aset tersebut belum dikatakan sebagai milik daerah pemekaran.

Seperti yang dikemukakan Baskerville (1993:65), dalam tipe-tipe pengelolaan konflik, dari enam tipe yang ditawarkan, ada beberapa tipe yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik penyerahan aset dalam kajian ini yakni *compromising*, *accommodating*, dan *collaborating*. Salah satunya dapat digunakan untuk meminimalisir adanya konflik yang lebih lama dan yang tak berujung. Hanya saja hal tersebut pun harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang tanpa mereka sadari telah terjadi konflik yang cukup berkepanjangan semenjak pemekaran tersebut dijalankan.

4. Kesimpulan

Dampak dari belum diserahkannya aset kepada daerah otonom baru yakni perencanaan pembangunan di daerah otonom baru tidak bisa dilaksanakan dengan cepat dikarenakan status aset yang masih belum jelas. Adapun hal lainnya adalah sisi estetika kota, yang mana banyak aset berupa gedung dan tanah daerah induk yang belum diserahkan tersebut tidak diurus dan dirawat oleh daerah induk dan terkesan dibiarkan saja. Dari sisi pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai aspek administrasi kependudukan, masyarakat yang berada di wilayah atau lokasi yang diklaim sebagai milik dari kedua daerah. Adapun masalah lain yang timbul adalah adanya wilayah enclave di tengah daerah otonom baru.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgements*)

Terima kasih kepada Badan Penelitian dan Perencanaan Daerah Provinsi NTT yang telah mendukung dalam penelitian yang dilakukan.

Referensi

- Akbal, M. (2016). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi*.
- BPHN. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- DaDson, J. E. (2006). Optimizing Land Asset Management in Ghana a Shared Responsibility and Recipi for Good Governance, . *Shaping the Change XXIII FIG Congress*.
- Dwisuda, P. (2014). Otonomi Daerah. *UNPAS*.
- Indonesia, M. S. (1996). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang. *Undang-Undang*.
- Lelan, S. N. (2018). Konflik Pelimpahan Aset Tidak Bergerak Daerah Induk. *Jurnal Inovasi Daerah Kota Kupang Vol II Nomor 1*, 14-24.
- Negara, S. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Undang-Undang Pemerintah Daerah*.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana Volume XIII No 2*.
- Pangayow, M. R. (2016). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume II*.
- Pangayow, M. R. (2016). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*.
- Rochmawati, D. R. (2018). Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 2*.
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 9*.
- Sari, M. D. (2016). *Skripsi*.
- Sari, M. D. (2016). Penyerahan Aset Tetap Daerah Dari Kabupaten Serang Kepada Kota Serang Provinsi Banten. *Skripsi*.
- Suharyo. (2011). Sejarah Perkembangan Otonomi Khusus Bali dan Pengaruhnya Bagi Keutuhan NKRI.
- Widayanti, E. (2010). Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatab Aset Tetap Pemerintah Daerah (studi Kasus di Kabuapten Sragen). *Tesis*.
- Widayanti, E. (2010). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (studi kasus di Kabupaten Sragen). *Tesis*.